



**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI  
KE KABUPATEN KARAWANG  
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019 – 2020  
TANGGAL 12 S/D 14 DESEMBER 2019**

.....

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK**

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Bupati Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dimana kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu langkah pengawasan Komisi II DPR RI terkait persiapan dan kesiapan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020.

Dalam rangka pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang keempat pada tanggal 23 September 2020. Pilkada diikuti 270 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dimana seluruh *stakeholders* yang terkait dalam pilkada serentak tahun 2020 mengharapkan penyelenggaraan pilkada berjalan lancar dan aman sehingga pilkada akan menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam menentukan aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Partisipasi masyarakat yang tinggi sangat diharapkan untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.

Persiapan pilkada serentak tahun 2020 telah dimulai sejak satu tahun sebelum hari pemungutan suara. Beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI dalam tahap persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 antara lain:

1. Sejak bulan September 2019 telah dimulai penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang harus sudah selesai pelaksanaannya pada tanggal 1 Oktober 2019. Namun, hingga saat ini dari 270 daerah yang ikut pilkada, masih banyak daerah yang belum menyelesaikan penandatanganan NPHD. Padahal jadwal penyelesaian penandatanganan NPHD sudah diperpanjang hingga 14 Oktober 2019.
2. Pada pilkada serentak tahun 2020 pemutakhiran data dan daftar pemilih berada pada tahapan persiapan padahal pada pilkada sebelumnya pemutakhiran data dan daftar pemilih masuk dalam tahap penyelenggaraan. Pemutakhiran data pemilih hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT) adalah tahapan yang paling krusial selain penghitungan. Bahkan, di pemilu serentak tahun 2019 yang lalu penetapan DPT dilakukan hingga tiga kali.
3. Selain itu, KPU dan Bawaslu di daerah harus segera menyiapkan pembentukan panitia adhoc seperti: PPK, PPS, PPDP, KPPS, PPPK, PPL, dan PTPS sebagai ujung tombak penyelenggara pilkada di daerahnya masing-masing.
4. Sosialisasi tahapan pilkada kepada masyarakat, khususnya peserta pilkada. Hal ini dimaksudkan agar seluruh stakeholder yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pilkada dapat ikut mengawasi jalannya pilkada di setiap tahapan. Sosialisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

5. Antisipasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pemerintahan daerah dalam mengatasi kemungkinan munculnya masalah logistik, seperti logistik salah kirim, kondisi rusak, jumlah tidak sesuai kebutuhan dan tidak tersegel, netralitas PNS, dan memastikan seluruh warga Negara yang berhak memilih memperoleh hak politiknya.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke Kabupaten Karawang berjumlah **13 orang** anggota yang dipimpin oleh anggota Komisi II DPR RI **Yth. Bapak H. Saan Mustofa, M.Si/Fraksi Partai NasDem** beserta anggota tim yang terdiri dari:

NO	No.Anggota	NAMA	KETERANGAN
1	A-367	Saan Mustofa, M.Si	Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II/F-Partai NasDem
2	A-152	Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc	Anggota/F-PDI.P
3	A-141	Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S	Anggota/F-PDIP
4	A-240	Drs. Cornelis, M.H	Anggota/F-PDIP
5	A-273	Ir.H.Arsyadjuliandi Rachman, MBA	Anggota/F-PG
6	A-308	Teti Rohatiningsih, S.Sos	Anggota/F-PG
7	A-79	Ir. H. Kamrussamad, ST., M.Si	Anggota/F-Gerindra
8	A-80	Dr. Ir. H. Sodik Mudjahidid, M.Sc	Anggota/F-Gerindra
9	A-370	Lestari Moerdijat	Anggota/F-NasDem
10	A-15	H. Yanuar Prihatin, M.Si	Anggota/F-PKB
11	A-533	H. Wahyu Sanjaya, SE	Anggota/F-PD
12	A-422	Dr.H. Mardani, M.Eng	Anggota/F-PKS
13	A-428	Teddy Setiadi, SI.Kom	Anggota/F-PKS
14	A-518	Mitra Fakhruddin MB	Anggota/F-PAN
15	A-462	Dr. H. Syamsurizal, SE., MM	Anggota/F-PPP
16	-	Dahliyah Bahnan, S.H., MH	Kasubag Rapat Set Komisi II
17	-	Dicky Firmansyah, S.Sos	Sestim
18	-	Sugiaman, SE	Sestim
19	-	Taofiek Hidayat	Sestim
20	-	Dr. Andi Zastrawati	TA Komisi II
21	-	M. Syamsul Fajri	TV Parlemen
22	-	Rahayu Setiowati	TV Parlemen

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 1 (satu) tenaga ahli dan 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, serta 2 (dua) reporter dari TV parlemen DPR RI.

## **B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK**

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Desember 2019. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Bupati Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, dibidang pengawasan.

## **II. HASIL KUNJUNGAN**

### **A. Sambutan Bapak Saan Mustofa, Pimpinan Komisi II DPR RI**

Pilkada adalah pintu menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan demokratis. Disamping itu Pilkada juga merupakan wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik dalam menentukan figur dan arah kepemimpinan daerahnya. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pilkada haruslah demokratis dan diimbangi dengan kesiapan yang matang setiap daerah untuk melaksanakan pilkada, serta koordinasi yang terus menerus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya terkait dengan netralitas ASN, pelaksanaan setiap tahapan pilkada seperti sengketa pencalonan, kampanye, dan debat publik, hingga koordinasi dengan aparat keamanan guna mendeteksi secara dini setiap potensi ancaman keamanan.

Secara khusus Kunjungan Komisi II DPR RI ke Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, KPUD Kabupaten Karawang, dan Bawaslu Kabupaten Karawang adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan di bidang Pilkada tahun 2020. Untuk itu Komisi II DPR RI ingin mengetahui dan memastikan :

1. Penyelenggaraan pilkada serentak di Provinsi Jawa Barat berjalan secara luber, jurdil dan demokratis.
2. Persiapan Anggaran Pilkada melalui NPHD tidak mengalami kendala apapun.
3. Pemerintah Daerah dan KPUD kabupaten Karawang memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak pilih warga negara, termasuk hak memilih bagi pemilih disabilitas yang sudah memenuhi syarat.
4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih serta memastikan warga Negara masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dengan tetap mengacu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Terkait dengan adanya masalah KTP elektronik, sudah banyak warga telah melakukan perekaman tapi belum mendapatkan KTP. Prosesnya berbulan – bulan, namun belum juga mendapatkan blanko. Dalam mengatasi masalah tersebut, Komisi II DPR RI dan Kemendagri sudah menyetujui anggaran pengadaan blanko.
5. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan KPUD Kabupaten Karawang dalam mengantisipasi masyarakat yang belum memiliki e-KTP tetap menggunakan hak pilihnya dalam pilkada nanti mengingat masih ada masyarakat yang belum memiliki e-KTP karena masalah pengadaan blanko yang belum memadai serta masalah teknis lainnya.
6. Persiapan pengawasan yang bersifat netral dan adil oleh Bawaslu Kabupaten Karawang terkait netralitas ASN, politik uang, kampanye hitam, intimidasi, penggunaan fasilitas negara, mobilisasi PNS, penggunaan sarana pendidikan dan tempat ibadah untuk kampanye, serta kampanye dini sebelum jadwal resmi. Terhadap netralitas PNS dan Polri memang jadi permasalahan disetiap Pilkada ataupun Pemilu, bagaimana PNS selalu dimobilisasi, bahkan dijadikan penggerak/tim sukses bagi calon kepala daerah tertentu. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana posisi PNS dalam pilkada, apakah tetap memilih atau dihilangkan hak politiknya seperti Polri dan TNI dalam pemilukada.

Pelaksanaan pilkada menelan biaya yang sangat mahal sehingga berdampak pada banyak hal, diantara politik uang, mahar politik dan sebagainya. Oleh karena itu perlu mencari solusi agar biaya politik tidak mahal.

## **B. Sambutan Bapak Samsuri, S.IP, Asisten Pemerintahan Kabupaten Karawang**

Pertama-tama, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menyampaikan permohonan maaf terkait ketidakhadiran Bupati Kabupaten Karawang karena menghadiri pertemuan dengan Presiden Jokowi, sekaligus ikut mendampingi peresmian jalan Tol Jakarta – Cikampek (Tol layang terpanjang di Indonesia). Pertemuan hari ini diwakilkan oleh Bapak Samsuri, S.IP, Asisten Pemerintahan Kabupaten Karawang. Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Karawang akan dilaksanakan secara bersamaan dengan 7 (tujuh) kabupaten yang juga melaksanakan pilkada di Provinsi Jawa Barat. Ke – 7 kabupaten tersebut yaitu Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Indramayu, Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangandaran dan Kota Depok.

### **Dasar hukum pelaksanaan pilkada yaitu :**

1. Pasal 201 Ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi : Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan **September Tahun 2020**.
2. Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi :
  - (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan **dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.
3. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015
  - (1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu **tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan**.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan **Peraturan KPU**.
4. PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Berikut gambaran Wilayah Pemilihan, DPT dan TPS Kabupaten Karawang :

**Tabel. 1.1**  
**Data DPT dan TPS Pilkada 2019**

<b>NO</b>	<b>DATA</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>30</b>
<b>2</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>309</b>
<b>3</b>	<b>DPT PEMILU 2019</b>	<b>1.669.959</b>
	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>838.075</b>
	<b>PEREMPUAN</b>	<b>831.884</b>

<b>4</b>	<b>DPT PILKADA 2015</b>	<b>1.575.128</b>
<b>5</b>	<b>TPS PILKADA 2015</b>	<b>2.628</b>
<b>6</b>	<b>TPS PEMILU 2019</b>	<b>6.344</b>
<b>7</b>	<b>TPS PILKADA 2018</b>	<b>3.022</b>
<b>8</b>	<b>PERKIRAAN TPS PILKADA 2020</b>	<b>3.530</b>

Pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan dukungannya dalam mensukseskan penyelenggaraan pilkada Kabupaten Karawang. Adapun dukungan pemerintah daerah Kabupaten Karawang berupa :

1. Pembiayaan
2. Netralitas ASN
3. Peran PJ/PJS KDH
4. Dukungan Mobilitas Logistik
5. Kamtibmas
6. Partisipasi Pemilih
7. Hak Pilih Masyarakat (DPT)

Adapun strategi yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada adalah :

1. Mengadakan Rapat Koordinasi persiapan Pilkada 2020.
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana (Ex: Fasilitasi Distribusi Logistik, dll).
3. Pembentukan Desk Pilkada untuk memantau, mengevaluasi dan melaporkan dinamika penyelenggaraan Pilkada.
4. Mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat secara maksimal, dengan memberikan jaminan kepada masyarakat pemilih agar dijamin keikutsertaannya.

Adapun dukungan peningkatan partisipasi pemilih dapat dilakukan melalui :

- a. Sosialisasi teknis pemilihan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkada melalui OPD wajib menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat..
  - b. Menentukan hari libur kepada masyarakat pada saat pemungutan suara, dengan menentukan tanggal dan bulan pelaksanaan pemungutan suara agar Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.
  - c. Memberikan Pemahaman kepada Pemilih untuk peduli dan berpartisipasi pada pelaksanaan Pilkada, agar masyarakat bisa mendapatkan iklim yang kondusif pada saat pesta rakyat demokrasi di beberapa daerah.
  - d. Mensosialisasikan pentingnya Pilkada melalui media cetak dan elektronik penentu bagi peningkatan partisipasi Pemilih.
5. Menjamin netralitas aparatur ASN.
  6. Memastikan Bahwa Hak-hak Pemilih itu terlindungi untuk mendapatkan informasi yang benar tentang Pasangan Calon melalui media cetak, elektronik dll sesuai ketentuan.

Terkait dengan tahapan persiapan penyelenggaraan pilkada Kabupaten Karawang dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut :

**Tabel. 1.2**  
**Jadwal dan Kegiatan Tahapan Pilkada**

NO	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	s/d 30 Sept 2019
2	PENYUSUNAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN KPU	s/d Penetapan Pasangan Calon Terpilih
3	SOSIALISASI DAN BIMTEK	1 Nov 2019 – 22 Sept 2020
4	PEMBENTUKAN BADAN AD HOC	1 Januari – 21 Agustus 2020
5	PENYERAHAN DP4 KE KPU	20 Feb – 27 Mar 2020
6	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	27 Mar – 22 Sept 2020
7	SYARAT DUKUNGAN PASLON PERSEORANGAN	26 Okt 2019 – 17 Jun 2020
8	PENDAFTARAN, PENELITIAN, DAN PENETAPAN PASLON	16 Jun – 8 Jul 2020
9	KAMPANYE	11 Jul – 19 Sept 2020
10	PEMUNGUTAN SUARA	23 September 2020
11	PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA	23 Sept – 05 Okt 2020
12	PENETAPAN CALON TERPILIH	PALING LAMA 5 HARI PASCA PUTUSAN MK

Secara prinsip persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 telah dilakukan sesuai tahapan. Seluruh Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Berikut rincian anggaran pilkada 2020 :

**Tabel. 1.3**  
**Anggaran Pilkada Kabupaten Karawang Tahun 2020**

NO	INSTANSI	USULAN	DISETUJUI	TA. 2019	TA. 2020	KET
1	KPU	79.351.744.621	74.620.440.500	2.489.975.000	72.130.465.500	NPHD Tgl 1 oktober 2019
2	BAWASLU	29.787.460.000	23.358.055.000	1.270.000.000	22.088.055.000	NPHD Tgl 1 oktober 2019
3	SATPOL. PP	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	DIPA SATPOL.PP (10.807.269. 820)
4	POLRES	6.057.219.820	6.057.219.820		6.057.219.820	
5	KODIM	2.949.750.000	2.949.750.000		2.949.750.000	
6	KEJAKSA AN	400.150.000	400.150.000		400.150.000	

7	SUBDENPOM	400.150.000	400.150.000		400.150.000		
8	DESK PILKADA	95.500.000	95.500.000		95.500.000	DPA TAPEM	BAG.

Dalam upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri, pemerintah Kabupaten Karawang telah menyiapkan serangkaian kegiatan, diantaranya adalah :

1. Deteksi dini dan pemetaan potensi stabilitas yang mempengaruhi dinamika politik lokal.
2. Pendidikan sosial, politik dan budaya kepada elemen masyarakat
3. Penguatan fungsi intelejen data.info yang akurat
4. Meningkatkan komunikasi dengan tokoh masyarakat, adat dan agama.
5. Pemanfaatan modal sosial (pendekatan sosio – kultural).

Untuk penguatan persiapan dan kesiapan serta pengawalan penyelenggaraan Pilkada, pemerintah daerah Kabupaten Karawang juga membentuk Desk Pilkada sebagaimana perintah UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Permendagri No. 9 Tahun 2005, Pasal 6 ayat (1) “Untuk pengendalian pelaksanaan PILKADA dibentuk Desk PILKADA Provinsi dan DESK PILKADA Kabupaten/Kota. Keanggotaan Desk Pilkada Provinsi dibentuk oleh Gubernur yang diketuai Sekda Prov. dan anggotanya dari unsur PemProv, Polda, dan Kejaksaan Tinggi. Sedangkan Desk Pilkada Kab/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota diketuai Sekda Kab/Kota Dan anggotanya dari unsur Pemda Kab/Kota, Polres, dan Kejaksaan Negeri. Adapun tugas Desk Pilkada adalah :

1. Melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan Pilkada
2. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan – permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada
3. Memberikan saran guna menyelesaikan permasalahan – permasalahan Pilkada
4. Melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan Pilkada secara berjenjang.

### C. Pemaparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang akan mengikuti pilkada serentak yang ke-dua kalinya pada tahun 2020 bersama 7 (tujuh) kabupaten lainnya (Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Indramayu, Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangandaran dan Kota Depok) di Provinsi Jawa Barat. Biaya Pilkada melalui NPHD ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2019 dan sudah dicairkan sebesar Rp. 2.489.975.000,- dari Rp. 74.620.440.500,- yang disetujui.

Saat ini KPU melakukan sosialisasi persyaratan untuk dukungan calon perseorang dan persiapan rekrutmen Badan ad hoc yaitu PPK dan PPS yang jadwalnya akan dilakukan pada bulan Januari 2020. Dalam penyampaiannya Ketua KPU Kabupaten Karawang saat ini masih menunggu PKPU tentang Tahapan Seleksi dan Persyaratan Rekrutmen PPK dan PPS. Melalui Komisi II DPR RI meminta agar KPU segera mengeluarkan PKPU yang dimaksud. Terkait dengan honorarium PPK dan PPS, KPU meminta agar Komisi II bisa lebih memperhatikan besaran honorarium badan ad hoc mengingat tingginya beban kerja. Sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 Tanggal 19 Februari 2016 tentang honoraroum PPK, PPS dan KPPS. Dalam surat Kemenkeu tersebut, honorarium untuk Ketua PPK sebesar Rp 1.850.000 setiap orang per bulan dan anggota PPK sebesar Rp 1.600.000 setiap orang per bulan. Sementara honorarium Ketua PPS



sebesar Rp 900.000 tiap orang per bulan dan anggota PPS sebesar Rp 850.000 tiap orang per bulan. Adapun honorarium Ketua KPPS sebesar Rp 550.000 tiap orang per bulan dan anggota KPPS Rp 500.000 tiap orang per bulan.

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pilkada, KPU intens melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, utamanya melakukan berbagai kajian persiapan, permasalahan penyelenggaraan pilkada dan penanganannya dan saling memberikan informasi.

#### **D. Pemaparan Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Karawang**

Bawaslu Kabupaten Karawang mengajukan anggaran pilkada melalui NPHD sebesar Rp. 23.358.055.000,- dan disetujui pada tanggal 1 Oktober 2019. Tahun anggaran 2019 sudah dicairkan sebesar Rp. 1.270.000.000,- digunakan untuk penguatan untuk kegiatan yang berkenaan dengan tahapan pilkada.

Saat ini Bawaslu Kabupaten Karawang sudah melaksanakan tahapan rekrutmen Panwas Kecamatan. Panwas Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum Rekrutmen PPK dan PPS, tujuannya untuk mengawasi tahapan rekrutmen badan *ad hoc* KPU. Saat ini yang mengajukan lamaran sebanyak 260 orang dan yang diterima 90 orang. Rekrutmen dilaksanakan berdasarkan prinsip kredible dan berintegritas.

Panwas akan mengawal seluruh tahapan pilkada yang akan dilaksanakan oleh KPU dalam rangka mewujudkan pilkada yang bersih dan berintegritas. Termasuk mengawasi netralitas PNS dan saat ini sudah giat melaksanakan sosialisasi baik melalui media cetak maupun media on line. Selain melakukan rekrutmen panwas kecamatan, saat ini Panwas Kabupaten juga mengawasi sosialisasi dan tahapan persyaratan minimal calon perseorangan.

#### **E. Dinas Kependudukan Catatan Sipil (DISDUKCATPIL)**

Data kependudukan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil merupakan data dasar yang dijadikan rujukan untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk menginput seluruh data pemilih, Disdukcapil melakukan perekaman melalui dua metode yaitu :

- a. Masyarakat sendiri yang datang melapor ke kantor Disdukcapil
- b. Disdukcapil menjemput bola dengan mengadakan program *go to school* dan *go to campus*.

Permasalahan saat ini adalah tidak adanya blanko yang tersedia sehingga belum bisa mencetak KTP-EL meskipun sebagian masyarakat sudah melakukan perekaman. Data lengkap tentang laporan pelaksanaan perekaman dan percetakan KTP-EL dapat dilihat dalam lampiran.

#### **F. Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)**

1. Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Pilkada, Kesbangpol memandang perlu mengkaji karakter politik masyarakat karawang, utamanya mengantisipasi munculnya kecurangan dalam pilkada
2. Perlu memperhatikan honor badan *ad hoc* penyelenggara pemilu, terlebih saat ini besaran honor tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang baru.
3. Memperhatikan ketidaksesuaian besaran yang sudah ditetapkan dalam PAGU dengan standar harga di pasar (jika terjadi perubahan harga).

## **G. Keamanan (Polres, TNI dan Satpol PP)**

Dalam pertemuan ini, beberapa hal yang disampaikan adalah :

1. Polres, TNI dan Satpol PP siap bekerjasama dan melakukan koordinasi hingga menjelang penyelenggaraan Pilkada dalam rangka mengamankan penyelenggaraan pilkada Kabupaten Karawang.
2. Terkait data – data personil yang akan dikerahkan akan dilaporkan
3. TNI dan Polri akan menjaga netralitas selama tahapan pelaksanaan Pilkada

## **III. CATATAN RAPAT**

1. Untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pilkada yang akan dilaksanakan di 270 daerah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta kepada penyelenggara pemilu menjaga integritas dan netralitas dalam Pilkada.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karawang perlu peningkatan kapasitas penyelenggara pilkada. Oleh karena itu memperketat persyaratan dan proses pembentukan Badan *ad hoc* harus mengedepankan prinsip keadilan dan kejujuran dalam upaya.
3. Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang, KPU Kabupaten Karawang, dan Bawaslu Kabupaten Karawang meningkatkan koordinasi untuk menyelesaikan perekaman dan pencetakan KTP-el agar masyarakat yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.
4. Komisi II DPR RI meminta kepada Bawaslu Kabupaten Karawang meningkatkan sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya money politics dan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mewujudkan pilkada serentak yang jujur, berkualitas, demokratis, dan berintegritas.

## **IV. PENUTUP**

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Pemerintah pada tanggal 21 sampai dengan 23 November 2019. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, 12 Desember 2019**

**KETUA TIM KUNJUNGAN**

**KOMISI II DPR RI**

**H. Saan Mustofa, M.Si**  
-----

**Lampiran :**

Sambutan Ketua Tim Kunspek Komisi II DPR RI, Bapak Saan Mustofa



Suasana Pertemuan/Diskusi Komisi II DPR RI dengan Pemda Kab. Karawang,  
Yang juga dihadiri oleh KPU, Bawaslu, TNI, Polres dan Satpol PP



Pemberian dan Penerimaan cenderamata Bapak Saan Mustofa  
sebagai Ketua TIM dan Asisten ! Bidang Pemerintah Kab. Karawang



Dok. TV. Parlemen.